

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik Dinasti merupakan hal yang identik pada sistem monarki yang secara jelas dapat menurunkan dan atau memberikan kekuasaan secara langsung kepada keturunan dan atau kerabat dengan tujuan mempertahankan kekuasaan agar bertahan lama. Artinya kekuasaan yang telah dikendalikan oleh elit lokal pada suatu daerah akan berusaha diperjuangkan agar lingkaran kekuasaan tidak keluar dari lingkungan keluarga sehingga suatu wilayah/daerah tetap dapat dikontrol oleh satu elit. Di Indonesia era demokrasi saat inipun Politik Dinasti bukan hal yang sulit untuk ditemukan, isu/kasus nyata dapat ditemukan dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan juga pada tingkat terendah yakni pemerintah desa.

Politik dinasti diberi pengertian sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dalam hubungan lingkup kekeluargaan. Politik dinasti juga mengacu pada terjadinya praktik politik kekerabatan sebagai upaya efektivitas dalam berjalannya politik dinasti dalam suatu lingkup pemerintahan. Politik dinasti telah lama ada di negara-negara demokrasi. Ini meningkatkan kekhawatiran tentang ketidaksetaraan dalam pembagian kekuasaan politik, yang dapat menunjukkan ketidaksempurnaan representasi politik demokratis, yang dikenal sebagai "kekuatan melahirkan kekuatan." Hal ini mengingatkan kembali masalah bahwa setiap kelas menunjukkan kecenderungan untuk menjadi turun-temurun, bahkan ketika posisi politik dapat diakses oleh semua orang. Posisi yang dimiliki keluarga penguasa akan memperoleh berbagai keuntungan (Dal Bo, Ernesto; Dal Bo, Pedro; Snyder, Jason, 2009) Padahal sebagaimana seharusnya setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih ketika ingin mencalonkan diri dalam kontestasi politik.

Politik dinasti merupakan proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi

kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Politik dinasti adalah musuh demokrasi sebab dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya. (Siregar et al., 2021). Era Demokrasi yang seharusnya membuka kesempatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sesuai dengan perundang undangan yang ada malah tetap memiliki dinding penghalang akibat eksisnya politik dinasti yang mengutamakan status. Demokrasi yang dalam prinsipnya mengedepankan keterlibatan masyarakat seolah dilupakan dampak wujud dari keberadaan politik dinasti yang dibangun oleh sekelompok golongan elit yang dalam satu lingkup kekeluargaan untuk mempertahankan kekuasaan. Sehingga politik dinasti lekat dengan familisme.

Pada kajian ilmu sosial dan politik, familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, dengan munculnya kebiasaan berupa menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya. Sebenarnya, preferensi politik keluarga mengarah pada perilaku yang menjaga moral, bukan mengejar kekuasaan. Sifat naluri manusia untuk selalu menjaga zona kenyamanan di mana ada fasilitas keamanan sangat erat kaitannya dengan orientasi untuk menjaga kelanggengan kekuasaan. Dengan demikian, para penguasa berusaha untuk menjaga kekuasaan mereka sendiri dan mencegahnya berpindah ke pihak lain. (Djati, 2015)

Fenomena politik dinasti dapat tumbuh dimana pun termasuk tingkat lokal pemerintah desa. Pada fenomena yang ada di Desa Gedawung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Trah Keluarga Sonodikromo menjaga kelanggengan kekuasaan tidak dengan mempertahankan posisi kepala desa untuk keluarga melainkan dengan menempatkan anggota keluarga maupun “orang” disetiap bagian pemerintah desa termasuk ke dusun/dukuh. Kemudian tidak hanya itu keluarga juga secara aktif memberikan pengaruh terhadap agenda pilkada bupati/DPRD, agenda pemilihan kepala desa, penunjukan lurah yang biasa terlihat adalah dukungan dari Trah Keluarga Sonodikromo. Tidak hanya dalam pemerintahan desa melainkan juga pada setiap agenda agenda

pemerintahan seperti kegiatan sensus, pemilu sudah pasti akan ada anggota keluarga Sonodikromo yang menjadi petugas. Menempatkan banyak anggota keluarga dan “orang/kroni” ini dinilai “lebih rapi” untuk mencapai kepentingan keluarga. Serta dapat memperluas jaringan serta massa yang diperlukan dalam kelangsungan praktik politik dinasti oleh Keluarga Sonodikromo ini. Selain itu Keluarga Trah Sonodikromo melakukan regenerasi secara terstruktur dan matang dimana generasi seterusnya didorong untuk memiliki pendidikan, koneksi, kemampuan kecakapan yang cukup serta mumpuni agar terus dapat memperluas dan memperkuat politik dinasti yang Keluarga Sonodikromo bangun sejak era orde lama. Akan terus dicari pula bakal calon “orang/kroni” yang nantinya di tempatkan pada posisi posisi tertentu, dengan tentunya memperhatikan ability, capability dari bakal calon tersebut.

Dari uraian di atas praktik politik dinasti yang dilakukan Keluarga Sonodikromo memiliki cara dan struktur yang terarah, serta Keluarga Sonodikromo mampu menggiring masyarakat agar dapat terus percaya bahwa keberadaan Keluarga Sonodikromo mendapat kepercayaan masyarakat jika keberadaan anggota Keluarga Sonodikromo di setiap sektor pemerintahan desa dapat mempermudah dan membantu masyarakat. Kemampuan mereka dalam mempertahankan kekuasaan dan memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat, demokrasi dalam desa dipersempit namun masyarakat sendiri kurang memiliki perhatian dan minat terhadap pemerintahan desa serta demokrasi yang berada di dalamnya.

Penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian I – (Djati, Wasisto Raharjo 2013)

Penelitian dilakukan oleh Wasisto Raharjo Djati dengan mengambil judul “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi : Dinasti Politik di Aras Lokal.”

Permasalahan yang dibahas mengenai dinasti politik yang berkembang dalam arena politik lokal. Tulisan ini menggunakan pendekatan budaya politik familisme dalam menganalisis dinasti politik lokal.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis kepustakaan (library research). Analisis didasarkan pengumpulan data sekunder berbasis kepustakaan yang dihimpun dari berbagai literatur yang mendukung, baik jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, maupun laporan penelitian yang valid. (Djati, 2015)

Hasil penelitian ini menunjukkan gejala familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas penguasa yang mengangkat saudara sebagai upaya menutupi aib kekuasaannya. Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai sumber politik seperti halnya populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membedakan karakter dinasti politik di Indonesia. (Djati, 2015)

2. Penelitian II – (Muhammad Taher Siregar, M. Arif Nasution* & Marlon Sihombing 2021)

Penelitian dilakukan oleh Muhammad Taher Siregar, M. Arif Nasution* & Marlon Sihombing mengambil judul “Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara”

Permasalahan yang dibahas deskripsi dan menjelaskan asal-usul, penyebab dan dampak yang terjadi dari munculnya politik dinasti di Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam asal-usul, penyebab dan dampak yang terjadi dari politik dinasti tersebut.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan dijabarkan secara sistematis nantinya. Adapun dengan menggunakan Reduksi Data, Triangulasi, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian mencatat bahwa bermula sejak terpilihnya Daman Huri Siregar menjadi kepala desa mulai tahun 2001 - 2011 (dua periode), kemudian muncul keinginan untuk melanjutkan kekuasaan dengan cara mewariskan kedudukan atau posisi tersebut kepada adik kandungnya melalui pemilihan kepala desa. Faktor yang menjadi pendukung akan hal ini adalah kepemilikan

modal secara ekonomi finansial yang cukup, memiliki modal sosial seperti jaringan yang kuat di kalangan masyarakat, memiliki modal simbolik dimana marga siregar yang dikenal sebagai marga kuat yang mendominasi sehingga marga lainpun kalah dengan nama besar yang telah dimiliki oleh marga siregar tersebut. Dampak dari politik dinasti itu sendiri terlihat bahwa kekuasaan hanya berputar pada satu keluarga yang sama, sehingga kesempatan/peleuang untuk orang lain untuk mendapatkan hak dalam ranah politik dan pemerintahan tidak didapatkan. Seba itu politik dinasti ini sangat merugikan dan memberikan dampak pada sistem pemerintahan maupun sistem demokrasi sebab peluang bagi orang-orang yang memiliki kapabilitas justru tidak memperoleh kesempatan/peleuang pada hak-hak aktif partisipasi dalam politik. (Siregar et al., 2021)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini ialah “Bagaimana cara kerja Politik Dinasti di Desa Gedawung oleh Keluarga Sonodikromo?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas maka didapat tujuan penelitian ini ialah :

1. Mengetahui praktik politik dinasti yang terjadi di Desa Gedawung Kecamatan Kismantoro oleh Keluarga Sonodikromo. Terkait dengan alur, cara dan kepentingan yang menjadi tujuan Keluarga Sonodikromo membangun politik dinasti.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama masa perkuliahan yang jikadibandingkan dengan penerapannya secara nyata.
 - b. Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Politik

Dinasti dalam Pemerintahan Desa Gedawung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pembaca, menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Politik Dinasti dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Gedawung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah)
- b. Bermanfaat bagi keilmuan khususnya di bidang ilmu sosial dan ilmu politik dalam kajian Politik Dinasti serta politik kekerabatan.

E. Penegasan Istilah

1. Politik Dinasti

Politik Dinasti merupakan proses regenerasi kekuasaan bagi golongan atau kelompok elit politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabat pada sektor pemerintahan. Namun tidak hanya keluarga kerabat, politik dinasti juga dapat memasukan orang lain sebagai kroni yang akan masuk pada lingkup politik dinasti suatu keluarga. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperbanyak massa dan memperluas lingkup jaringan yang dapat dikuasai oleh suatu dinasti tersebut. Dengan begitu maka himpunan kekuatan kekuasaan yang dimiliki untuk dapat keluarga tersebut mendapatkan tujuannya semakin mudah dan kekuasaan yang dimiliki dapat semakin bertahan dalam jangka waktu yang lama, tentunya harus dengan tetap menjaga agar dimana keluarga tetap dalam satu tujuan, satu jalan begitu pula dengan kroninya.

2. Budaya Politik Familisme

Familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan dan posisi jabatan tertentu. Familisme sebagai upaya untuk membangun kekuatan serta kekuasaan keluarga baik secara ikatan pernikahan, kemudian kekeluargaan sebab menjadi bagian

dari kroni dari sebuah dinasti politik.

3. Elit

Elit dikatakan sebagai sekelompok kecil golongan yang memiliki kekuasaan serta privilege social yang dapat memberikan pengaruh bagi jalannya suatu organisasi bahkan pemerintahan. Elit Politik memiliki power untuk mempengaruhi jalannya suatu roda pemerintahan dengan peran serta sokongan yang dilakukan oleh kelompok elit tersebut. Kebijakan, rancangan, anggaran, jabatan aspek aspek tersebut dapat dipengaruhi oleh Elit politik dalam hasil keputusan keputusannya. Dengan adanya elit ini setiap kebijakan, rancangan, anggaran, jabatan, program yang ada bisa jadi bukan merupakan pure dari kebutuhan dan kepentingan bersama masyarakat melainkan untuk memberi keuntungan kemudahan bagi kepentingan daripada para elit yang ada pada suatu lingkup lingkungan.

F. Landasan teori

1. Politik Dinasti

Politik dinasti merupakan proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Politik dinasti merupakan musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyatlah yang memilih para pemimpinnya. (Siregar et al., 2021) Politik Dinasti dibangun sebagai upaya mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan serta tujuan dari suatu kelompok/golongan. Adanya politik dinasti ini terdapat pengertian positif dan negatif. Negatif dan positif tersebut bergantung pada proses dan hasil (outcomes) dari pemanfaatan kekuasaan dan atau wewenang yang dipegang oleh jaringan politik dinasti yang dimiliki.

Sementara itu Jemma Purdey dalam tulisannya berjudul “Political Families in Southeast Asia” 2016 menjelaskan political dynasty sebagai lanjutan babak dari political family atau kondisi ketika anggota keluarga bisa ‘mewariskan’ atau ‘membagikan’ jabatan-jabatan kepada anggota keluarga lainnya. Dengan

tujuan mengisi setiap posisi tersebut dengan anggota keluarga kerabat maupun kroni yang dimiliki keluarga tersebut. Salah satu dampak mengenai adanya politik dinasti adalah bahwa nantinya akan muncul ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik yang dimana hal tersebut mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokrasi itu sendiri. Karena seperti yang bisa diketahui ketika sebuah politik dinasti terbuka atau terbangun, semua ikatan keluarga akan saling memberikan dan berbagi keuntungan maupun kekuasaan yang ada sebagai upaya menguatkan serta memperluas praktik dari politik dinasti ini.

Disebutkan oleh Gunanto pada Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia (Gunanto, 2020) bahwa Politik dinasti di Indonesia dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Politik dinasti *By design* melalui proses pembentukan yang sudah lama. Yang artinya secara relasi kemudian jejaring sosial dan keluarga dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan dan kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa direkayasa keberhasilan tujuannya. Yang tentu dengan tujuan mempertahankan politik dinasti yang sudah lama terbentuk tersebut.
2. Adapun politik dinasti *By accident* terjadi ketika pada situasi suksesi pemerintahan kemudian secara tiba-tiba masuk mencalonkan kerabat/anggota keluarga untuk menggantikan posisi jabatannya. Apabila nanti calon tersebut bisa menang dalam kontestasi politik tujuan untuk menjaga kekuasaan informal terhadap penggantinya inipun dapat tercapai.

Sebenarnya Politik dinasti memungkinkan dapat diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik dan posisi suatu jabatan tersebut berjalan secara adil dan profesional yang mana harus didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record kemampuan yang baik untuk menduduki posisi posisi dalam pemerintahan tersebut (Gunanto, 2020).

2. Budaya Politik Familisme

Dalam pengertian lain, familisme juga dipahami sebagai tatanan sosial baru, dorongan psikologis yang menuntut seseorang untuk dapat berkarir di dua ranah, ranah publik sebagai birokrasi dan ranah korporat-swasta satu ranah privat (Garzon, 2002). Secara konseptual, preferensi politik keluarga justru mengarah pada perilaku moral ketimbang pengejaran kekuasaan. Adapun orientasi mempertahankan kekuasaan selama-lamanya sangat erat kaitannya dengan fitrah manusia, yaitu selalu menjaga zona nyaman dan fasilitas yang dibangunnya. Untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa yang telah mereka peroleh dan pertahankan.

Tiga varian familisme, Pertama adalah familisme (familism), yakni dinasti politik yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (consanguinity) dan hubungan perkawinan (marriage) dengan keluarga lainnya. Untuk keluarga politik yang lebih lemah posisinya tentu hal ini akan menguntungkan. Penggabungan dengan keluarga politik yang lebih kuat akan menjamin eksistensi serta memberi sokongan perlindungan bagi keluarga politik lemah (Garzon, 2002). Dan disisi lainnya, keluarga politik yang lebih kuat mendapatkan jejaring yang lebih besar lagi dengan adanya ikatan keluarga lainnya. Ini berpengaruh pada tambahan kekuatan, masa, sokongan, dukungan modal sosial untuk memperkuat sebuah keluarga politik. Oleh karena itu familisme dengan memanfaatkan hubungan perkawinan ini adalah bentuk dari penyatuan dua keluarga harus simbiosis mutualisme yakni yang saling memberikan manfaat serta keuntungan bagi kedua belah keluarga. Tiga hal yang menjadi poin penting familisme untuk menjaga stabilitas dari hubungan keluarga politik dinasti tersebut ini diantaranya ialah : loyalitas, kepatuhan, dan solidaritas keluarga.

Menariknya, pengaruh kekerabatan tidak hanya terjadi di level legislatif dan eksekutif, tetapi juga menembus pada yudikatif serta aparat penegakan hukum. Karena semakin banyak anggota dalam politik dinasti semakin banyak wilayah yang dapat dimanipulasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan keluarga politik dinasti tersebut. Yang mana nantinya tentu dapat memberi keuntungan kepada

keluarga politik dinasti tersebut.

Kedua adalah quasi-familisme. Tonghee menjelaskan didasarkan pada afeksi yang dimaksudkan bukan makna sebenarnya dimaksudkan sebagai kasih sayang melainkan sebuah orientasi politik keluarga yang didasarkan pada tribalisme, regionalisme, dan lingkungan yang sama dengan keluarga tersebut. Dengan hal lain, politik dinasti ini tidak lagi terbatas pada keluarga inti; melainkan telah bercabang dengan keluarga lain serta memiliki sistem kekerabatan yang telah dibuat secara artifisial daripada ikatan darah murni. Oleh karena itu, dalam model quasi-familisme, setiap anggota keluarga berusaha menggunakan simbol tertentu untuk menunjukkan identitas mereka (Tonghee, 2009).

Ketiga adalah egoisme-familisme. Model ini didasarkan pada penerapan aspek-aspek fungsionalis daripada sekadar mengikuti garis keturunan atau kekerabatan. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yaitu dari perspektif pemimpin daerah dan masyarakat. Egoisme pemimpin lokal sebagian besar konsisten dengan gagasan teoretis sebelumnya yang mendukung prioritas keluarga atau kelompok daripada publik ketika memegang jabatan publik atau suksesi pemerintahan (Tonghee, 2009). Kepala daerah yang digantikan masih memiliki pengaruh terhadap penggantinya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa terdapat pemerintahan bayangan yang dilakukan kepala daerah demisioner terhadap penggantinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengamankan program-program kebijakan maupun proses penganggaran yang telah dilakukan. (Djati, 2015)

3. Teori Elit

Elit yang ada serta tumbuh pada sebuah Pemerintahan menunjukkan bahwa pada penyelenggaraan dan sistem demokrasi birokrasi yang ada pada suatu Pemerintahan masih manipulatif serta dikuasai maupun dikendalikan oleh sekelompok elit yang ada pada wilayah tersebut yang dimana dengan memanfaatkan masyarakat sebagai objek dari kebijakan. Hal ini tentu memberikan pengaruh pada jalannya pemerintahan yang tidak objektif,

Pemerintahan seakan menjadi pemenuh kebutuhan bagi para elit kekuasaan, kepentingan para elit menjadi prioritas dalam rumusan kebijakan suatu Pemerintah yang kemudian masyarakat menjadi kehilangan peran partisipasi aktif sebagai bentuk ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap para pelaku Pemerintah.

Pada hakikatnya setiap masyarakat selalu diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang dapat memberikan efek pada kekuasaan sosial dan politik (Pareto, 1935). Kelompok kecil inilah yang disebut sebagai elit yang mana mereka orang-orang yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari dua kelas : Pertama, lapisan atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah (Governing Elit) dan elit yang tidak memerintah (Non Governing Elit) seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tuan tanah dan lain sebagainya. Kedua, lapisan yang lebih rendah yaitu non-elit seperti masyarakat pada umumnya, petani dan lain sebagainya. (Amin, 2017).

Pada kondisi tertentu terdapat ciri yang membedakan antar elit satu dan lainnya, yaitu kemampuan leadership dan menjalankan kontrol politik. Jika suatu kelompok elit yang sedang berkuasa memiliki pemimpin yang kurang dalam hal kecakapan tidak kecil kemungkinan elit tersebut kehilangan kredibilitas hingga akan muncul elit baru yang memiliki kecakapan lebih dalam masyarakat hingga menjatuhkan elit yang berkuasa sebelumnya. Di kutip dari (Jurdi, 2010) menurut Robert Putnam setidaknya ada tiga model analisis elit yang dapat digunakan;

- Pertama, analisis posisional yang menempatkan elit pada posisi struktural organisasi, merekalah yang banyak memberi andil dalam masyarakat.
- Kedua, analisis reputasional yang memposisikan elit sebagai orang keputusan-keputusan organisasi, mempunyai pengaruh tinggi meskipun ia tidak berada dalam struktur organisasi tersebut atau berada dalam posisi informal dalam masyarakat.
- Ketiga, ialah analisa keputusan yang memposisikan elit sebagai orang yang

mempunyai pengaruh dalam organisasi sehingga ide-ide dan gagasan pemikirannya menjadi sumber referensi keputusan organisasi. Dengan kata lain, dalam hal ini elit memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif. Dengan begitu jelas bahwa Teori elit menjelaskan jika elit politik merupakan realitas yang ada dalam setiap masyarakat

G. Definisi Operasional

Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluargakepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Politik dinasti yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dari politik dinasti ini adalah kekuasaan.

Politik dinasti merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dalam sebuah lembaga politik, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga acap kali mendapatkan keistimewaan untuk menempati berbagai posisipenting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi. (Bimantara, 2018)

Teori Elit, diartikan sebagai sebuah kelompok kecil dalam masyarakat maupun organisasi yang memiliki power untuk memberikan pengaruh pada suatu organisasi/pemerintahan serta previlege sosial untuk menjadikan kelompok elit ini mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat serta memiliki pengaruh kekuasaan secara sosial maupun politik. Elit mengacu kepada minoritas dari mereka yang memimpin atau menjalankan kekuasaan untuk mempengaruhi urusan publik.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Menurut (Denzin, 1978) penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Seorang peneliti haruslah berperan sebagai objek yang ditelitinya serta memahami pula objek yang diteliti untuk memahami secara mendalam makna makna yang ada dalam suatu fenomena sosial yang tengah diamati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi partisipatif dan wawancara mendalam selain itu juga melakukan kajian dokumen sebagai upaya pencarian data. Menggunakan jenis penelitian studi kasus, berfokus pada fenomena yang terjadi pada satu daerah dengan menghasilkan deskripsi mendalam mengenai satu kesatuan individu, golongan, kelompok, situs, kelas, program, kebijakan, proses, institusi maupun suatu komunitas. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “what (apa)”, “how (bagaimana)”, atau “why (mengapa)” terhadap suatu fenomena (McCuster, K; Gunaydin, S, 2015)

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di lingkup Desa Gedawung tepatnya berada di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah, desa ini merupakan salah satu desa yang menjadi lingkup praktik politik dinasti politik kekerabatan oleh Keluarga Sonodikromo. Kemudian desa ini adalah desa tempat tinggal dari hampir seluruh Keluarga Sonodikromo termasuk penulis sehingga dengan letak strategis ini memberi kemudahan serta keleluasaan penulis untuk melakukan pengamatan, penelitian langsung dan penggalan informasi/data.

3. Subjek/Informan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan teknik pengambilan sample dengan Teknik *purposive sampling*. Sedang subjek penelitian ialah Pemerintah Desa Gedawung Kecamatan Kismantoro anggota keluarga dari Sonodikromo

kemudian masyarakat Desa Gedawung, agar nantinya di dapat informasi yang bisa menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.

No.	Nama	Jabatan
1.	Parji	Sekretaris Desa Gedawung
2.	Ascar	Kepala Dusun Klampisan
3.	Tino	Anggota BPP Kismantoro
4.	Daman	Tokoh masyarakat
5.	Leni Anggraini	Tokoh organisasi
6.	Heni	Tokoh masyarakat

Tabel 1.1

Pertama, Sekretaris Desa Gedawung. Kedua, Ketua rt dukuh kopen sekaligus anggota BPP Kismantoro. Lalu lurah/ Kepala Dusun Klampisan Desa Gedawung. Yang mana ketiganya adalah keluarga Sonodikromo. Kemudian sisanya merupakan masyarakat umum/tokoh Desa Gedawung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari wawancara mendalam dan observasi Darlington & Scott (2002) dalam (Rachmawati, 2017)

a. Observasi

Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati, dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek penelitian dengan menggunakan pedoman observasi (Narbuko, 2003). Penelitian ini membutuhkan pengamatan politik dinasti, relasi kekuasaan, strategi, dan metode politik untuk mendapatkan pemahaman yang objektif. Observasi lapangan secara langsung merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang suatu lokasi penelitian dan populasinya, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan penelitian. Observasi dapat memberikan gambaran nyata bagaimana subjek dan objek penelitian berinteraksi.

Dengan begitu penelitian kualitatif ini mendapat data baik dan lebih absah

ketika dilengkapi dengan analisa mengenai perilaku dan konteks subyek dan obyek penelitian. Untuk keperluan inilah maka metode observasi tepat untuk digunakan. Schensul dalam Given (2008 p.522) berpendapat bahwa observasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam penelitian kualitatif. Observasi bermanfaat untuk mengumpulkan berbagai data perilaku atau interaksi sosial. (Rachmawati, 2017)

Metode pengumpulan data melalui observasi, pembahasan ditekankan pada empat model observasi yaitu (1) observasi partisipasi/participant observation, (2) observasi non-partisipasi/non participant observation, (3) observasi tersembunyi/covert observation, (4) observasi langsung/direct observation dan (5) observasi naturalistik/naturalistic observation (Rachmawati, 2017).

b. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, dengan melakukan wawancara yakni mengajukan pertanyaan pada informan tentu peneliti akan mendapatkan informasi dan data sebagai bahan analisis penelitian. Wawancara/interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data juga memberikan jawaban secara lisan pula (Barlian, 2016). Wawancara mendalam ialah temu muka berulang antara peneliti dan subyek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri (Taylor, Bogdan, 1996). Wawancara mendalam biasa bersifat fleksibel, terbuka, tidak terstruktur, dan tidak formal. Pertemuan berulang kali secara langsung antara peneliti dan subyek penelitian. Tujuannya untuk memahami pandangan subyek penelitian tentang kehidupan, pengalaman, atau situasi subyek penelitian, dengan diungkapkan dalam pengertian serta bahasa dari subyek maupun informan sendiri.

Dalam ilmu sosial, wawancara masih di terima secara luas sebagai salah satu cara andalan untuk pengumpulan data. Namun dalam perkembangannya,

metode pengumpulan data yang lain dalam penelitian kualitatif seperti penggunaan autobiografi, penelitian partisipatif (participative research) dan collective memory work atau ingatan kolektif mulai dipergunakan dalam penelitian kualitatif. Metode lain pengumpulan data misalnya adalah menggunakan catatan harian (diaries) (Rachmawati, 2017).

Macam-macam cara pembagian wawancara adalah :

1. wawancara pembicaraan informal
2. pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara
3. wawancara baku terbuka (Moleong, Lexy J, 2007).

c. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan kegiatan pengumpulan, pencarian data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi diperlukan sebagai penguat atas data dan informasi yang di dapatkan. Selain itu dokumentasi juga dapat bertujuan untuk laporan kegiatan. Proses dokumentasi juga dapat dilakukan dengan pencarian, pengumpulan dokumen/arsip atau data yang berkaitan dengan tujuandan fokus penelitian. Bentuk dari dokumentasi dapat berupa laporan tertulis, laporan tidak tertulis ataupun media seperti rekaman suara, foto, video yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Teknik Dokumentasi sangat penting untuk melengkapi data guna menganalisis pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data dari beberapa informan dan data lain yang diperlukan untuk penulisan artikel ini (Ushuluddin et al., 2018).

Kegiatan dokumentasi dapat dibedakan atas tiga tahap kegiatan :

- mengidentifikasi atau memilih apa yang akan diabadikan;
- mendapatkan atau mengadakan apa yang akan diabadikan;
- menyimpan agar objek tersebut abadi atau lestari.

Ketiga tahap tersebut menghasilkan kumpuhin objek dokumentasi (akumulasi informasi). Akumulasi informasi ini perlu ditata sedemikian rupa

agar pada saat diperlukan mudah ditemukan kembali (Blasius Sudarsono, 2003)

5. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data tentu hal selanjutnya ialah analisis data untuk dapat menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Analisa data dilakukan dengan metode Miles & Huberman dengan tahapan pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

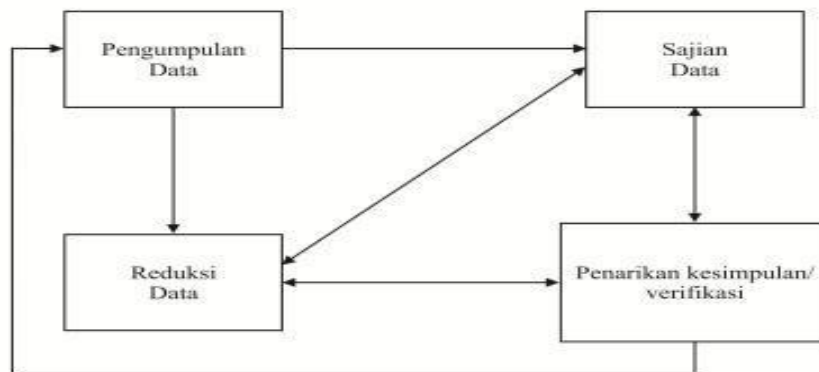
Teknik pengumpulan data adalah Teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid. Misal adalah melalui angket, wawancara, observasi, uji atau tes, dokumentasi dan lain sebagainya.

b. Reduksi Data

Ketika melakukan wawancara maupun dalam proses penggalian pencarian informasi tidak menutup kemungkinan jika informasi yang peneliti dapatkan jumlahnya tidak sedikit dan menjadi data mentah, maka untuk mempermudah dalam menganalisis data perlu dilakukan reduksi/perangkuman untuk mendapat informasi/data pokok yang terfokus pada rumusan masalah yang ada. Hal ini juga mempermudah peneliti dalam mencari kekurangan ataupun mengumpulkan informasi/data yang diperlukan dalam penelitian.

(Huberman & Miles, 1992) Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Kurangi kuantifikasi yang tidak perlu diinterpretasikan sebagai data. Cara reduksi data:

1. seleksi ketat atas data
2. ringkasan atau uraian singkat
3. menggolongkannya dalam pola yang lebih luas



Gambar 1.1 Tahap analisis data miles&huberman (Miles, M.B ; Huberman, A.M, 2009)

c. Penyajian Data

Setelah Reduksi maka selanjutnya data akan disajikan. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif:

1. teks naratif: berbentuk catatan lapangan
2. matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Format-format ini menggabungkan informasi yang disusun dalam bentuk yang koheren dan mudah dipahami, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulannya benar, dan sebaliknya, untuk dianalisis ulang (Huberman & Miles, 1992). Maka dengan begitu data yang ditampilkan pun dapat mudah dipahami, tersusun secara pola dan terorganisir.

d. Penarikan Kesimpulan

Kemudian tahap selanjutnya yakni menarik kesimpulan dari hasil data yang didapatkan, meskipun terdapat kemungkinan muncul perbedaan antara kesimpulan awal dengan bukti-bukti yang ditemukan. Maka kesimpulan akhir pun dapat berubah sesuai dengan validasi data yang telah didapatkan peneliti.

6. Keabsahan Data

Keabsahan dari suatu data menjadi hal yang utama ketika melakukan

penelitian, segala informasi dan data yang didapatkan harus sesuai dengan fakta lapangan fenomena sebenarnya. Maka untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, dimana validasi data dilakukan dengan melakukan perbandingan menggunakan sesuatu selain data dengan data yang didapat. Terdapat empat tipe triangulasi (Denzin, 1978)

1. triangulasi data: penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian
2. triangulasi peneliti: penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian
3. triangulasi teori: penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data
4. triangulasi teknik metodologis: penggunaan sejumlah teknik dalam suatu penelitian

Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yang terdiri dari tiga hal yakni 1) deskriptif, 2) interpretasi, dan 3) teori dalam penelitian kualitatif (Bachri, 2010).

Pada penelitian ini digunakan triangulasi metodologis yakni menggunakan sejumlah teknik dalam suatu penelitian, triangulasi data yang diperoleh dari penelitian berupa hasil wawancara, dokumen dan observasi. Dengan menggunakan metode triangulasi data ini membandingkan informasi dan data. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kredibilitas informasi tertentu. Wawancara dan observasi dilakukan untuk memvalidasi informasi yang ada serta dilakukan triangulasi pada tahap ini agar tidak ada keraguan pada informasi atau data yang didapat peneliti dari subjek maupun informasi. Kemudian triangulasi peneliti dengan melihat keilmuan/teori serta hasil dari penelitian terdahulu.